

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menyempurnakan tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN (PjPHP) DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 37 TAHUN 2018

TANGGAL : 9 Juli 2018

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) PADA
UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Estu Retno Yulianti, S.E. NIP. 19810725 201502 2 001 Calon Auditor	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Inspektorat
2.	Ivana Suprpto, S.E. NIP. 19820725 201502 2 001 Analisis Monitoring dan Evaluasi	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Yan Ari Wibowo, A.Md. NIP. 19900107 201502 1 001 Pranata Barang dan Jasa	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Biro Umum dan Keuangan
4.	Resa Anggriani, S.Psi NIP. 19860709 201012 2 001 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
5.	Andi Darmawan, S.T. NIP. 19940518 201801 1 001 Analisis Sistem Informasi	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6.	Tino Yuka Aldila, S.T. NIP. 19870702 201502 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
7.	Reza Alwan Affandi, S.E. NIP. 19910525 201402 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

8.	Eva Nurdinna Agustini, S.T. NIP. 19800816 201012 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
9.	Lulu Haryani, S.T. NIP. 19870423 201502 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
10.	Doddy Pascal, S.T. NIP. 19840223 201502 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
11.	Vialita Octaviani, S.Mb. NIP. 19911029 201502 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
12.	Anatasia, S.Psi., M.M. NIP. 19881217 201012 2 001 Kepala Seksi Tata Kelola Pengelola Pengadaan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
13.	Juniarty Erika Magdalena Saragi, S.Pd. NIP. 19890623 201502 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
14.	Atmojo Heri Prasetyo, S.T. NIP. 19780902 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
15.	Ali Masrochan, S.T.P. NIP. 19870926 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I
16.	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi, S.E. NIP. 19821101 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Sulawesi	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah II

17.	Mita Astari Yatnanti, S.E. NIP. 19850924 201012 2 001 Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
-----	---	---

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA